

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MENDAPATKAN PIALA ADIPURA TAHUN 2017

Oleh:

Fahrul Rozi

Email: fahrulrozi2203@gmail.com

Pembimbing: Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The Adipura Cup is an award for the cleanest and most beautiful city / district. With certain criteria, a team formed by the Ministry of Environment and Forestry assesses the cleanliness of the city and its beauty. Kuantan Singingi Regency is one of the regencies that received the Adipura trophy in 2017. This success cannot be separated from the cooperation and coordination of various parties, the institutions that participated in the success of the program. The formulation of the problem of this research is what are the efforts of the Kuantan Singingi Regency Government in getting the Adipura trophy in 2017?

This research is descriptive research with a qualitative approach. The location of this study was conducted in Kuantan Singingi Regency. Data collection techniques are carried out with qualitative data analysis. While the results of the study concluded that the efforts of the Regional Government of Kuantan Singingi Regency in obtaining the Adipura trophy were already optimal. Judging from the four coordination indicators, there are two indicators which are not optimal in their implementation, namely communication and meeting meetings. In addition, on the task division indicator and cooperation has been running optimally and no significant problems were found.

While the factors that influence the efforts of the Regional Government of Kuantan Singingi Regency in obtaining Adipura trophies there are supporting factors, namely the high commitment of the regional head and the existence of funds. While the inhibiting factor is the lack of public awareness of the environment.

Keywords: *Efforts, Local Government, Adipura Cup*

PENDAHULUAN

Lingkungan yang bersih merupakan awal hidup sehat. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya. Yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹

Di Indonesia sendiri untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bersih Pemerintah Indonesia membuat berbagai macam kegiatan serta melakukan berbagai macam upaya dan program kebersihan yang tujuannya adalah menciptakan Indonesia yang bersih dan hijau. Masalah lingkungan merupakan persoalan bersama, tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah. Akan tetapi, sebenarnya faktor kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk merawat, memelihara, dan menjaga lingkungan bersihlah yang menjadi faktor dominan yang sangat penting serta ciptakan pola hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari. Kesadaran untuk berbudaya bersih, gotong royong dan peduli akan lingkungan yang harus terus dibuat di

tengah-tengah masyarakat agar kelestarian daratan dan lautan tetap terjaga.

Piala Adipura merupakan penghargaan terhadap kota terbersih dan asri. Dengan kriteria tertentu, sebuah tim yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penilaian terhadap kebersihan kota dan keasriannya. Program Adipura bertujuan untuk mendorong kepemimpinan Pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha dengan pemberian penghargaan Adipura untuk mewujudkan wilayah yang berkelanjutan, secara ekologis, sosial, dan ekonomi.²

Sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan program Adipura disusun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura. Dalam Permen LHK ini, Program Adipura dilaksanakan pada kabupaten/kota yang dikelompokkan berdasarkan kategori fungsional kota:

- a. Kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa;
- b. Kota sedang dengan jumlah penduduk 100.001 (seratus satu ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa;
- c. Kota besar dengan jumlah penduduk 500.001 (lima ratus satu ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa; dan
- d. Kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih besar dari 1.000.000 (satu juta) jiwa

¹ N.H.T Siahaan, (*Hukum Lingkungan dan ekologi pembangunan*). (Jakarta : Erlangga. 2004). Hlm. 4.

² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/kum.1/6/2016

Program Adipura harus mampu mendorong terwujudnya kota-kota di Indonesia yang tidak hanya bersih, hijau, dan sehat, namun juga berkelanjutan dalam mewujudkan kota-kota yang layak huni (*livable city*). Kota-kota yang berkelanjutan harus mampu mengintegrasikan aspek pembangunan ekonomi, pembangunan social, dan juga pembangunan lingkungan dengan turut mendorong partisipasi aktif masyarakatnya.

Tujuan program Adipura adalah terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah yang bersih dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta sebagai dorongan terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibidang lingkungan hidup, yang salah satunya dalam bentuk anugerah Adipura yang diberikan terhadap kabupaten/kota yang dinyatakan berhasil dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan sebagai kota terbersih dan teduh.³

Lokasi yang wajib ada pada kota peserta Adipura meliputi, permukiman menengah dan sederhana, jalan arteri dan kolektor, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, terminal bus atau terminal angkutan kota atau pelabuhan sungai/laut, hutan kota, taman kota, saluran terbuka, TPA, bank sampah, fasilitas pengelolaan sampah skala kota, stasiun kereta api saluran terbuka berupa sungai, danau, dan pantai wisata.

Untuk penilaian capaian kinerja pengelolaan sampah meliputi kebersihan, sampah terolah dan pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sedangkan penilaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) diantaranya, sebaran dan fungsi peneduh, penataan dan perawatan, keanekaragaman hayati, kemudahan akses, fungsi resapan. Penilaian capaian kinerja pada lokasi pemantauan mewakili kondisi keseluruhan lokasi pemantauan.

Penilaian Adipura sering menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, banyak orang yang mengatakan Adipura merupakan kebijakan pemerintah daerah, tidak dapat dipungkiri mengingat bahwa Bupati dan Wakil Bupati merupakan pejabat politik, dan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah bukanlah untuk kepentingan politik semata melainkan juga untuk kepentingan masyarakat bersama dalam hal ini berkaitan dengan hak setiap masyarakat untuk merasakan hidup aman dan nyaman dengan lingkungan yang teduh dan sehat.⁴

Di tahun 2017 Pemerintah Indonesia kembali menyelenggarakan penghargaan Adipura. Hari Rabu (2/8/2017) merupakan salah satu hari bersejarah bagi Kabupaten Kuantan Singingi. Diumur yang ke-17, Teluk Kuantan sebagai Ibukota Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu ini menerima penghargaan Adipura atau kota terbersih untuk kategori kota kecil.

Bupati Kuantan Singingi, Drs, H. Mursini, M.Si menerima langsung penghargaan Adipura dari Menteri

³ Indah Septiana, Skripsi, *Evaluasi Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mempertahankan Adipura Tahun 2014-2015*, (FISIP, Universitas Riau). Hlm. 4

⁴ Zulfikar, *Strategi Pemerintah Dalam Penerimaan Adipura di Kabupaten Maros*, Jurnal Administrasi publik, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2015, Hlm. 186

Perekonomian Republik Indonesia, Prof. Darmin Nasution di Plaza Ir Soejono Manggala Wanabakti Jakarta. Usai diserahkan Menteri Perekonomian yang didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya, Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo yang hadir saat itu langsung memberikan ucapan selamat kepada Bupati Mursini dan kepala daerah lainnya yang menerima penghargaan serupa. Turut hadir menyaksikan penyerahan penghargaan Adipura tahun 2017, Menteri Kabinet Kerja dan Gubernur Riau, Drs. H. Arsjad Juliandi Rachman, MBA. Penyerahan sempena peringatan hari lingkungan hidup se-dunia tahun 2017.

Keberhasilan ini tidak lepas dari kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak, lembaga-lembaga yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program. Pendekatan utama dalam koordinasi adalah komunikasi, karena dalam pelaksanaan ruang dan waktu yang memperlancar tujuan koordinasi adalah hubungan antara individu atau instansi. Koordinasi berarti kerjasama, maka dalam kerjasama akan terdapat suatu hubungan atau komunikasi. Kerjasama adalah suatu tindakan untuk mencapai tujuan atau keuntungan bersama. Dalam sudut Adipura kerjasama sangat diperlukan dikarenakan untuk meraih adipura tidak bisa satu instansi saja yang menangannya, diperlukan kerjasama dengan instansi terkait yang sama-sama menangani yang terkait Adipura agar tercapainya tujuan atau keuntungan bersama.

Upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mendapatkan Adipura yaitu dengan melibatkan berbagai dinas dan badan yang berkaitan dengan lingkungan seperti,

Dinas Lingkungan Hidup menjadi koordinator untuk mensosialisasikan hal apa saja yang fokus dinilai agar Adipura bisa terwujud. Dinas Pendidikan fokus memantau kebersihan sekolah, khususnya dalam kota Teluk Kuantan. Kecamatan Kuantan Tengah, melakukan upaya sosialisasi kebersihan desa dan kelurahan dalam kota Teluk Kuantan. Dalam upaya mendapatkan piala Adipura ini pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : Kpts.58/III/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Teknis, dan Tim Sekretariat Adipura Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mendapatkan Piala Adipura Tahun 2017”**.

RUMUSAN MASALAH

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam proposal penelitian ini, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : Apa Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mendapatkan Piala Adipura Tahun 2017 ?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mendapatkan Piala Adipura tahun 2017.

KERANGKA TEORI

1. Tindakan Pemerintah

Istilah tindakan pemerintah merupakan terjemahan dari istilah *bestuurhandeling* (Belanda). Para ahli berbeda - beda dalam menerjemahkannya, ada yang menggunakan istilah perbuatan, dan ada pula yang menggunakan dengan istilah tindakan, bahkan ada yang menggunakan keduanya istilah "perbuatan atau tindakan".⁵

Van Vollenhoven berpendapat, bahwa tindakan pemerintahan (*Bestuurshandeling*) merupakan suatu tindakan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendahan.⁶

Tindakan pemerintah adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan alat perlengkapan pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ini ada yang merupakan tindakan hukum dan ada yang berupa tindakan nyata. Tindakan hukum berdasarkan sifatnya merupakan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum (menciptakan hak dan kewajiban).⁷

Tindakan hukum pemerintah ada yang berdasarkan hukum publik, dan berdasarkan hukum privat. Tindakan berdasarkan hukum publik merupakan tindakan pemerintah yang didasarkan pada hukum publik (bersifat hukum administratif dan memiliki akibat hukum administratif). Tindakan hukum publik

dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Tindakan membuat keputusan
2. Tindakan membuat peraturan
3. Tindakan materil

Tindakan pemerintah yang berbentuk hukum privat merupakan tindakan pemerintah dalam kedudukannya bukan sebagai pemerintah. Tindakan ini sebagai wakil dari badan hukum dan bukan tugas untuk kepentingan umum, sehingga tindakannya didasarkan pada ketentuan hukum privat (keperdataan). Apabila pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, maka hukum publiklah yang berlaku dan apabila bertindak tidak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, maka hukum privatlah yang berlaku.⁸

2. Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu.⁹

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang

⁵ Muh. Jufri Dewa. *Hukum Administrasi Negara*. (Kendari : Unhalu Press. 2011)

⁶ S.F Marbun. *Hukum Administrasi negara*. (Yogyakarta : FH UII Press. 2012).

⁷ Darda Syahrial. *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 2012)

⁸ Murtir Jeddawi. *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Total Media. 2012)

⁹ Talizidihu Ndaraha, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan) Jilid I*. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003). Hlm. 29

telah ditentukan.¹⁰ Menurut James D. Mooney koordinasi adalah susunan yang teratur (*orderly arrangement*) dari usaha kelompok (*group effort*), untuk menciptakan kesatuan tindakan (*unity of action*) dalam mengejar tujuan bersama (*common purpose*).¹¹

Mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan itu, antara lain dengan memberi instruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat, dan mengadakan coaching (pelatihan) dan bila perlu memberi teguran.¹² Proses koordinasi dilakukan untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dalam pelaksanaan tugas organisasi, koordinasi memegang peran penting bagi tercapainya tujuan utama yang telah ditetapkan oleh organisasi bersangkutan. Menurut Hasibuan tujuan koordinasi adalah :

- a. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran organisasi.

- b. Untuk menjurus keterampilan spesialis ke arah sasaran organisasi
- c. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan
- d. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tujuan dan sasaran
- e. Untuk mengintegrasikan pemanfaatan unsur – unsur manajemen ke arah sasaran organisasi
- f. Untuk menghindari kegiatan *overlapping* dari sasaran organisasi.¹³

Menurut Handoko fungsi koordinasi yaitu karena adanya kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya.¹⁴

Menurut Harold dan Cyrill O'Donnel dalam Sutarto menyatakan bahwa koordinasi yang baik hendaklah memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya Perencanaan yaitu menyangkut proses persiapan dan pelaksanaan secara sistematis daripada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
2. Adanya hubungan koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan.
3. Adanya pertemuan rapat-rapat.¹⁵

Koordinasi adalah proses penyatu paduan sasaran-sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah untuk mencapai

¹⁰George R. Terry. *Azas-azas Manajemen*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2006). Hlm. 23.

¹¹ James D Mooney dalam Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003). Hlm. 42

¹² M. Manullang. *Dasar-dasar Manajemen*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2008). Hlm.12.

¹³Malayu Hasibuan, *Manajemen:Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revis. Cetakan keenam. (Jakarta : Bumi Aksara, 2007). Hlm. 86

¹⁴ T. Hani Handoko, *Manajemen*. Edisi kedua. Cetakan ke-18. (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta. 2003). Hlm. 12.

¹⁵Sutarto. *Dasar-dasar Organisasi*. (Yogyakarta:PT. Gadjah Mada University Press. 2006). Hlm. 144

tujuan organisasi yang efisien.¹⁶ Menurut Stoner koordinasi adalah proses pemaduan tujuan dan kegiatan unit – unit yang terpisah (departemen atau bidang – bidang fungsional) dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Koordinasi yang efektif merupakan titik tolak dari keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Stoner koordinasi yang baik dan efektif dapat dilihat dari 4 indikator sebagai berikut :

1. Adanya perencanaan dan pelaksanaan yang efektif akan memberikan bantuan untuk mencapai koordinasi yang baik, perlu ditetapkan apa yang menjadi tujuan dan menentukan kebijaksanaan – kebijaksanaan yang dirasa perlu sebelum pemimpin harus membuat pondasi dasar dalam koordinasi yang efektif.
2. Adanya komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah terlebih dahulu harus mengetahui sebaik – baiknya apa yang direncanakan dan siapa yang merencanakan.
3. Adanya pembagian tugas dan hubungan kerja antar kelompok dalam kerjasama.
4. Adanya pengawasan terhadap unit – unit pelaksana.¹⁷

Stoner juga berpendapat bahwa koordinasi yang baik dan efektif itu dapat dilihat dari :

1. Perencanaan

Perencanaan adalah keputusan yang akan dikerjakan untuk waktu yang

akan datang, yaitu suatu perencanaan yang diproyeksikan dalam suatu tindakan. Sedangkan langkah – langkah perencanaan adalah adanya tujuan kerja dan adanya penetapan sasaran rencana kerja.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah sebagai suatu informasi atau pesan melalui saluran-saluran yang disusun dari pada orang - orang yang bertindak sebagai pusat komunikasi. Komunikasi dilakukan dengan tiga cara : adanya pertemuan / rapat antar pegawai, adanya komunikasi tidak langsung, adanya perhatian pimpinan.

3. Pembagian Tugas

Pembagian tugas timbul dikarenakan seseorang untuk melakukan segala macam pekerjaan. Oleh karena itu pembagian tugas berarti pengkhususan yang dipertimbangkan antar lain perincian tugas, pengadaan dan penempatan pegawai, kewajiban dan tanggung jawab agar terdapat efisiensi dalam menggunakan tenaga atau antara instansi-instansi yang terkait.

4. Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan apa yang harus dikerjakan agar sesuai dengan apa yang direncanakan, disamping untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan yang dihadapi dan berusaha untuk melakukan tindakan perbaikan. Adapun proses dari pada pengawasan adalah sebagai berikut: Pemberian laporan-laporan dari tugas dilaksanakan, pengawasan langsung ke lapangan oleh atasan.

¹⁶ Hessel Nogi S. Tangklisan. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. (Yogyakarta:Lukman Offset, 2004). Hlm. 72

¹⁷ James A.F. Stoner. *Manajemen Jilid II*. (Jakarta : Erlangga. 1992). Hlm. 37.

Menurut Henry Fayol koordinasi adalah mengikat bersama menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha.¹⁸ Untuk terciptanya suatu organisasi yang baik menurut Henry Fayol berupa :

1. Antara unit dan sub unit dengan unit lainnya dapat bekerja sama dengan serasi
2. Masing – masing unit dan sub unit mengetahui bagian tugas yang mana yang harus bekerjasama dengan unit lainnya
3. Unit atau sub unit harus dapat menyesuaikan diri dengan jadwal dan waktu kerjasama unit / sub unit lainnya.

Henry Fayol mengemukakan dalam mengkaji pelaksanaan koordinasi yang baik hendaklah memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Adanya komunikasi
- b. Adanya kerjasama
- c. Adanya pembagian tugas
- d. Adanya pertemuan / rapat¹⁹

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian deskriptif kualitatif pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan menetapkan kawasan Taluk Kuantan sebagai lokasi sekaligus sebagai objek penelitian adalah karena Taluk Kuantan merupakan Ibukota Kecamatan Kuantan Tengah dan merupakan Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi. Salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang meraih penghargaan piala Adipura tahun 2017 kategori kota kecil terbersih.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Jadi dalam data primer sumber datanya diperoleh melalui wawancara responden.²¹

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari Surat Keputusan Bupati Nomor : Kpts.58/III/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Teknis, dan Tim Sekretariat Adipura Kabupaten Kuantan Singingi, dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

¹⁸ Inu Kencana Syafie. *Ilmu Administrasi Publik*, Edisi Revisi. (Jakarta : Rineka Cipta. 2006). Hlm.85.

¹⁹ Ibnu Syamsi S.U. *Pokok – Pokok Organisasi dan Manajemen*. (Jakarta : Rineka Cipta. 1994). Hlm.14.

²⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2014). Hlm.11.

²¹ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (cetakan ke-14). (Jakarta:Rineka Cipta. 2013). Hlm. 22

dalam Mendapatkan Piala Adipura Tahun 2017 yang dapat memperkaya data primer. Jadi dalam data skunder sumber datanya diperoleh melalui dokumentasi.²²

4. Sumber Data

Data diperoleh secara langsung dari informan penelitian dengan melakukan wawancara dengan informan dan mengumpulkan sumber data pendukung lainnya untuk mendukung penelitian ini. Informan penelitian dipilih secara purposif berdasarkan posisional informan yang dianggap mengetahui segala hal yang berhubungan dengan pembahasan ini. Pemilihan informan secara purposif ini dimaksudkan agar informan yang dipilih dapat menjelaskan serta memberikan informasi secara akurat terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka ataupun dengan memanfaatkan sarana komunikasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Dalam sebagian besar pendekatan kualitatif, analisis data tidak dilakukan dalam satu tahap saja, setelah data terkumpul. Analisis data kualitatif merupakan proses sistematis yang berlangsung terus-menerus, bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis awal biasanya sederhana saja, namun akan berkembang kompleks seiring dengan perkembangan riset.²³ Data yang penulis peroleh baik dari data primer maupun sekunder, dikembangkan dengan teknik deskriptif, dimana data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan. Analisis data yang digunakan penelitian kualitatif adalah menganalisis suatu dokumen, data, tabel-tabel, grafik-grafik yang tersedia yang kemudian dilakukan uraian dan penafsiran terhadap fenomena yang akan diteliti. Data dianalisis dan diolah dengan cara:

1. Pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai jenis data di lapangan yang mendukung penelitian ini.
2. Reduksi data, reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan dalam bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu

²² Ibid.,

²³ Cahya Wiratama. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations and*

Marketing, (Bandung: PT Benteng Pustaka. 2002). hlm:369

dalam penyajian data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dapat diverifikasi.

3. Penyajian data, penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Menarik kesimpulan, menarik kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dimana data harus diuji kebenarannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mendapatkan Piala Adipura Tahun 2017

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi maka pemerintah berupaya keras mendorong percepatan pembangunan dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam serta investasi dunia usaha di daerah. Upaya tersebut memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sangat besar bagi kesejahteraan rakyat, namun disisi lain juga telah memberikan tekanan terhadap lingkungan yang pada akhirnya berujung pada munculnya berbagai macam pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, polusi udara, kerusakan tanah akibat produksi biomassa, kebakaran hutan dan lahan dan sebagainya.

Pembangunan di daerah tentu saja tidak bisa dihentikan karena itu sudah

merupakan hal yang perlu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat tetapi dampak negatif dari pembangunan tersebut juga tidak bisa dibiarkan karena lambat laun akan menyengsarakan kehidupan masyarakat luas.

Dalam kondisi seperti ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi akan memainkan peran yang sangat strategis yaitu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan daerah agar lingkungan hidup yang sehat, nyaman dan produktif dapat diwujudkan. Hal ini dilakukan melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan penegakan hukum. Dengan adanya upaya-upaya ini maka pembangunan daerah akan berjalan menuju pada arah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Upaya yang tidak kalah pentingnya yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi adalah peningkatan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup agar kelestarian sumber daya alam hayati dan non hayati dapat terjaga.

Upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam ini melibatkan banyak pihak baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha ataupun masyarakat. Masyarakat sebagai salah satu elemen penting didalam kehidupan

bernegara, memiliki peran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup yang sangat penting.

Peran masyarakat tersebut dapat berbentuk pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, laporan dan informasi kepada pemerintah terkait dengan permasalahan lingkungan hidup. Berbagai alasan peran masyarakat diperlukan antara lain masyarakatlah yang biasanya paling merasakan dampak lingkungan, terkadang dilain pihak masyarakat justru yang memberikan tekanan dan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

Disamping itu masyarakat bisa menjadi ujung tombak di lapangan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peningkatan promosi dan investasi di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat (*community approach*) dalam rangka mengajak mereka berperan serta dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam khususnya masyarakat yang bermukim di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, masyarakat yang tinggal di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) serta masyarakat yang berdiam di daerah penyangga atau berbatasan/berdekatan dengan kawasan-kawasan konservasi.

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Kuantan Singingi dalam dekade terakhir ini semakin meningkat. Kondisi ini akhirnya berimplikasi pada

semakin besarnya tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu tugas yang harus dijalankan adalah mewujudkan pengelolaan informasi lingkungan hidup yang berkualitas. Berkualitas disini diartikan bahwa informasi lingkungan hidup yang dikelola bersifat akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan bisa di akses dengan mudah oleh masyarakat luas atau publik.

Dengan demikian, pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dapat ditingkatkan. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi sikap dan perilaku publik sehingga publik akan lebih mencintai lingkungan hidup dan lebih mendukung upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Upaya upaya diatas dapat terlaksana dengan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi pemerintah. Proses sinkronisasi dan koordinasi ini yang membentuk sinergi di daerah yang memiliki kesamaan pandangan dan komitmen dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menjadi wahana pertukaran informasi lingkungan hidup yang efektif antar instansi. Dalam penelitian ini mengkaji tentang upaya pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mendapatkan piala adipura dengan menggunakan teori koordinasi yang dikemukakan oleh Henry Fayol.

1. Komunikasi

Koordinasi berarti kerjasama, maka dalam kerja sama ini terdapat suatu hubungan atau komunikasi. Komunikasi yang maksimal dapat menjelmakan menjadi koordinasi yang maksimal pula. Cara komunikasi haruslah digalakkan sebagai suatu yang harus ada dalam setiap kegiatan, sehingga setiap informasi yang memerlukan koordinasi dapat tersalurkan. Banyak informasi yang diperlukan untuk bahan koordinasi dapat disalurkan melalui kertas-kertas kerjanya berjalan melalui seluruh rute dari suatu bagian ke bagian lain. Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan menggunakan media dan cara penyampaian. Sehingga informasi dapat dipahami oleh pihak kedua, serta saling memiliki kesamaan arti lewat transmisi pesan secara simbolik. Sebagai suatu proses penyampaian informasi, individu yang terlibat dalam kegiatan komunikasi khususnya komunikator perlu merancang dan menyajikan informasi yang benar dan tepat dan disajikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi dan tingkat penerima komunikasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berkoordinasi melalui komunikasi baik lisan, tulisan, maupun rapat. Dalam upaya mendapatkan piala adipura ini pemerintah daerah memberikan amanah kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai *leading sektor* terhadap apa saja kegiatan atau program yang akan dilakukan. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi koordinator dan menyampaikan informasi tentang perintah dan arahan kepada setiap instansi atau lembaga – lembaga yang terkait dalam tim koordinasi adipura. Pemberian perintah dalam upaya

mendapatkan piala adipura telah dibentuknya Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts.58/III/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Teknis, Tim Sekretariat Adipura Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.

2. Kerjasama

Kerjasama merupakan proses hubungan antara yang satu dengan yang lain yang mempengaruhi tugas dan tujuan yang sama. Kerjasama pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian tugas yang dilakukan secara bersama – sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam sebuah lembaga – lembaga kerjasama tim telah menjadi sebuah kebutuhan untuk mewujudkan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Kerjasama tim akan menjadi suatu dorongan sebagai energi maupun motivasi bagi setiap individu yang tergabung dalam suatu tim kerja. Jika kerjasama ini dapat berjalan dengan baik, maka kelancaran berkomunikasi maupun rasa tanggungjawab pada setiap individu yang ada di dalam tim kerja akan tertentu. Kerjasama dibutuhkan adanya saling pengertian dari personil yang bertugas maupun antara instansi terkait. Dalam melakukan upaya dalam mendapatkan adipura, maka diperlukan kerjasama yang baik.

3. Pembagian Tugas

Pembagian tugas adalah pengelompokan tugas – tugas yang sejenis atau erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya untuk dilakukan oleh seorang pejabat tertentu. Oleh karena itu, pembagian tugas berarti pengkhususan yang dipertimbangkan, antara lain :

pedoman perincian dan uraian tugas, adanya penempatan pegawai yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya di bidang masing – masing yang saling bekerja sama. Dengan adanya pembagian tugas dalam suatu organisasi, maka dalam pelaksanaan tugas – tugas tidak terjadi kesimpang siuran.

Adapun pembagian tugas dalam mendapatkan adipura yang dilakukan oleh Kabupaten Kuantan Singingi ini yakni sesuai dengan keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 58/III/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Teknis, dan Tim Sekretariat Adipura Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.

Pembagian tugas di atas merupakan tugas tertulis yang diperintahkan langsung oleh Bupati, selain tugas tertulis tersebut Bupati dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup memberikan perintah secara lisan yang disampaikan ketika rapat pertemuan membahas tentang adipura yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut Bupati memberikan penjelasan apa saja yang harus dilakukan oleh tim – tim yang bertugas.

4. Pertemuan Rapat

Rapat adalah Kumpulan beberapa orang atau organisasi yang akan membicarakan suatu masalah atau kepentingan bersama untuk memberikan penjelasan, memecahkan suatu persoalan dan sekaligus mengadakan perundingan demi memperoleh suatu hasil yang disepakati atau disetujui bersama. Rapat juga berguna agar hubungan antara anggota tim terjalin hubungan yang terkait dan jelas secara keseluruhan yang dapat mendorong terjadinya koordinasi yang baik.

Tujuan diadakannya rapat itu sendiri adalah sebagai alat untuk memecahkan atau mencari jalan keluar, untuk menyampaikan informasi dan perintah serta pernyataan, sebagai alat koordinasi dan agar peserta rapat dapat ikut berpartisipasi kepada masalah – masalah yang sedang terjadi.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mendapatkan Piala Adipura Tahun 2017.

1. Faktor Pendukung

a. Tingginya Komitmen Kepala Daerah

Berbagai upaya dan tindakan oleh Kabupaten / Kota di Indonesia dalam upaya meraih dan mempertahankan anugerah adipura setiap tahunnya. Salah satunya yaitu berkoordinasi dengan instansi – instansi terkait untuk secara bersama – sama meraih penghargaan adipura, karena tidak mungkin satu instansi saja yang dapat mewujudkannya. Dalam mewujudkan kerjasama tersebut tentunya harus diawali dengan komitmen dari kepala daerah itu sendiri, yang merupakan faktor pendukung dalam upaya meraih adipura ini.

Wujud dari komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meraih penghargaan adipura, selain tegas dalam upaya pelaksanaan kegiatan adipura ini juga diwujudkan melalui pemberian *reward* kepada petugas kebersihan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan

b. Adanya Anggaran Dana

Anggaran dana berfungsi sebagai sarana pendorong dalam prosese kegiatan yang diberikan dengan sengaja kepada

anggota agar dalam diri mereka tumbuh semangat yang lebih besar dalam bekerja. Pemberian dana dalam upaya meraih adipura di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian hasil kegiatan yang maksimal. Karena anggaran dana sangat penting sebagai penunjang dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Semakin besar anggaran yang diberikan maka semakin maksimal pula hasil dari kegiatan yang dilaksanakan.

2. Faktor Penghambat

a. Kesadaran Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan serta kebiasaan aktivitas masyarakat yang mengganggu lingkungan dapat menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakat dapat menghambat upaya pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mendapatkan Adipura.

Kesadaran masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang terhadap lingkungan, meskipun telah dikeluarkan peraturan namun masih banyak dilanggar oleh masyarakat. Sehingga ini menyebabkan sulitnya pemerintah daerah dalam melaksanakan upaya kegiatan adipura yang tujuannya terhadap lingkungan yang sehat dan bersih

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai Upaya Pemerintah Daerah kabupaten Kuantan Singingi dalam Mendapatkan Piala Adipura, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mendapatkan Piala Adipura berjalan

sudah optimal. Dilihat dari empat indikator koordinasi, ada dua indikator yang dalam pelaksanaannya kurang optimal yaitu, komunikasi dan pertemuan rapat. Komunikasi yang dilakukan dalam mengupayakan Adipura ini kurang efektif pada hakikatnya untuk melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugas perlu dilakukan komunikasi yaitu melalui pertemuan agar kinerja dapat sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Kemudian pertemuan rapat yang tidak terjadwal dan terencana, karena dalam membahas dan menyelesaikan suatu permasalahan harus adanya rapat pertemuan yang terjadwal dan terencana tidak cukup dengan satu atau dua kali pertemuan saja, karena dengan adanya rapat yang lebih terjadwal akan memudahkan dalam proses kegiatan dan kinerja yang dilakukan lebih optimal. Selain itu pada indikator pembagian tugas serta kerjasama telah berjalan dengan optimal dan tidak ditemukan masalah yang berarti.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mendapatkan piala Adipura terdapat faktor pendukung yaitu tingginya komitmen kepala daerah dan adanya anggaran dana. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

SARAN

1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi harus lebih

- dioptimalkan, harus diadakan evaluasi terhadap kegiatan Adipura tahun 2017 lalu guna untuk dapat meraih kembali dan mempertahankan Adipura pada tahun yang akan datang.
2. Diperlukan penanganan–penanganan yang khusus untuk menyelesaikan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dan menghambat proses pelaksanaan kegiatan Adipura. Dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga dalam upaya mendapatkan Adipura ini terdapat adanya partisipasi dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (cetakan ke-14). Jakarta : Rineka Cipta.
- Dewa, Muh. Jufri. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Kendari : Unhalu Press.
- Jeddawi, Murtir. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Total Media.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen. Edisi kedua. Cetakan ke-18*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2007. *Manajemen:Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revis. Cetakan keenam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Manullang, M. 2008. *Dasar - dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Marbun, S.F. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Ndraha, Talizidihu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan) Jilid I*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan ekologi pembangunan*. Jakarta : Erlangga.
- Stoner, James A.F. 1992. *Manajemen Jilid II. Diterjemahkan oleh Agus Maulana MSM, Hendardi, dan Kristina*. Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Sutarto. 2006. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta : PT. Gadjah Mada University Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*, Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta
- Syahrial, Darda. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Syamsi S.U, Ibnu. 1994. *Pokok – Pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Rineka Cipta
- Tangklisan, Hessel Nogi S. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Lukman Offset.

Terry, George R. 2006. *Azas-azas Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Wiratama, Cahya. 2002. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations and Marketing*. Bandung: PT Bentang Pustaka

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura

Jurnal

Jurnal Administrasi Publik, Zulfikar. Volume 1 Nomor 2 Agustus 2015 tentang “Strategi Pemerintah dalam penerimaan Adipura di kabupaten Maros.”

JOM FISIP, Mardhiyah Yunus. Vol. 2 No. 2 Oktober 2015 tentang “Pelaksanaan koordinasi dalam rangka meraih penghargaan Adipura di Kabupaten Pasaman.”

Skripsi

Indah Septiana, 2016, Evaluasi Strategi pemerintah kota Pekanbaru dalam mempertahankan Adipura tahun 2014-2015. Skripsi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Artikel

16 Tahun Puasa, 2017 Adipura Berlabuh di Kuansing dalam KuansingTerkini.com.

Pedagang Kuansing : Untuk Apa Adipura, Kalau Rakyatnya Sengsara dalam Senuju.com.

Mursini Optimis Kuansing Bisa Raih Adipura dalam Riaubook.com

JeFrinaldi : Masalah Lingkungan merupakan tanggungjawab bersama dalam RiauGlobal.com.

Penambangan Ilegal akibat Sungai di Kuantan Singingi Tercemar dalam mediacenter.riau.go.id

Sampah Menggunung di Sekitar Terminal dan Jalan Tobek Panjang dalam Kuansingterkini.com